

DIGITALISASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (PELUANG DAN TANTANGANNYA)

Riris Kusmiyati, Rahmanita Ginting, Muhammad Thariq

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ririskusmiyati.insp@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi birokrasi menjadi sebuah tuntutan yang sangat mendesak untuk dipenuhi, demi untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses pelayanan, serta untuk transparansi dan akuntabilitas kualitas pelayanan. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ke depannya pemerintah perlu selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk mampu memberikan layanan digital yang prima. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan berupaya memanfaatkan media digital sebagai peluang dalam menyebarkan informasi layanan terhadap publik, seperti penggunaan Instagram, Facebook, Website, Tiktok maupun media cetak. Tantangan Dinas Kominfo Kabupaten Asahan yang belum mampu menerapkan dan memenuhi Peran Kehumasan Kominfo pada peningkatan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar.

Kata Kunci: Program Digitalisasi, Media, Pelayanan Publik

Abstract

Digitalization of the bureaucracy is a very urgent demand to be fulfilled, in order to increase the ease and speed of the service process, as well as for transparency and accountability for service quality. Public service is the concrete face of the state's presence in people's everyday lives. Going forward, the government needs to always adapt to technological developments, including being able to provide excellent digital services. The Asahan District Communication and Informatics Office seeks to utilize digital media as an opportunity in disseminating service information to the public, such as the use of Instagram, Facebook, Website, Tiktok and print media. Challenges The Office of Communication and Informatics of Asahan Regency has not been able to carry out and fulfill the role of Communication and Information Public Relations in improving public services in meeting the growing needs of society.

Keywords: Digitalization Program, Media, Public Service

Introduction

Digitalisasi birokrasi sebuah kalimat yang fenomenal dan menjadi sorotan berbagai kalangan yang pada akhirnya menjadi kata yang sering diucapkan. Yang dalam kajian ini bermaksud memperlihatkan bahwasanya peran digitalisasi memiliki *power* dalam menyebarkan dan menginformasikan berbagai informasi guna untuk mempengaruhi orang lain. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital, melompat menuju pemerintahan berbasis digital. Situasi ini merupakan sebuah tuntutan untuk dapat terus mengikuti perkembangan dunia yang terus-menerus berubah.

Perubahan yang begitu besar ini memerlukan kecepatan serta konvergensi di berbagai

bidang termasuk pelayanan publik. Tak terhindarkan dan dapat dipungkiri bahwa intervensi dan campurtangan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Memasuki era revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu keniscayaan pada semua bidang dan semua sektor, termasuk di sektor pemerintah.

Digitalisasi birokrasi menjadi sebuah tuntutan yang sangat mendesak untuk dipenuhi, demi untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses pelayanan, serta untuk transparansi dan akuntabilitas kualitas pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diperhatikan bahwa sumber daya manusia (SDM) Birokrasi dan infrastruktur teknologi informasi harus ditingkatkan secara bersamaan dan terintegrasi. Komunikasi digital ditandai dengan perkembangan internet yang memberikan semacam perubahan komunikasi antara institusi (pemerintah) dan khalayak (internal [ASN] dan eksternal [masyarakat]), yaitu poros komunikasi bisa berasal dari internal dan eksternal, transparansi menjadi kebutuhan dan kuasa mengubah pesan dan gambar bisa dimanipulasi oleh khayalak (Theaker, 2001).

Dinas Kominfo Kabupaten Asahan ialah organisasi pemerintah yang bergerak dalam hal pelayanan penerima informasi publik, penyebarluasan informasi ke publik, layanan hubungan media serta penyediaan narasi pemberitaan atau *press release*. Dalam upaya mengkomunikasikan atau menyebarluaskan informasi tentang program digitalisasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Asahan, Dinas Kominfo membuat narasi berita yang kemudian menjadi konten di media resmi milik Pemerintah Kabupaten Asahan, baik itu *website* maupun media sosial. Narasi yang dibuat oleh Dinas Kominfo ini juga yang menjadi *press release* untuk dibagikan kepada para awak media dan wartawan yang kemudian turut menyebarkan ke masyarakat melalui media masing-masing. Program Digitalisasi Birokrasi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 tersebar di beberapa dinas dalam bentuk berbagai program dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan inilah yang perlu dipublikasikan dan disebarluaskan agar diketahui oleh masyarakat luas, yang dalam hal ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo sebagai humasnya Pemerintah.

Dengan demikian, aspek kerja tersebut kemudian muncul sebagai peran penulisan narasi atau yang lebih terkenal dengan sebutan *copywriting*. Secara teori, ada banyak perangkat komunikasi yang lain, seperti gambar, simbol, dan bahasa tubuh. Akan tetapi, pepatah mengatakan, pena lebih tajam dari pedang. Mengingat tidak semua hal dapat

diungkapkan melalui bentuk visual, maka kata-kata atau narasi kemudian bisa menjadi alat komunikasi paling efektif. Selain menyampaikan informasi dan penjelasan secara verbal, narasi atau sering juga disebut *copywriting* dapat berfungsi persuasi dan bahkan memprovokasi.

Copywriting adalah kegiatan penulisan kreatif yang dikerjakan oleh seorang *copywriter*. Tugas seorang *Copywriter* adalah merancang kalimat dan desain simbol yang tepat untuk digunakan dalam menyebarkan informasi, baik itu dengan menggunakan media publikasi *website* internal, sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter*. Seorang *copywriter* dituntut untuk bagaimana membuat narasi di media sosial semenarik mungkin, baik itu berupa ajakan maupun informasi yang diberikan. Kegiatan pembuatan *copywriting* membutuhkan orang-orang yang menulis dan merangkai kata-kata supaya lebih menarik dan mampu menarik perhatian pembaca. Maka demikian, program digitalisasi menarik untuk dikaji untuk menganalisa sejauhmana perkembangan arus informasi yang diterima oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan.

Literature Review

Program Digitalisasi Birokrasi

Transformasi birokrasi yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital sangat mendukung penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang mana membutuhkan kolaborasi antara 3 (tiga) pilar utama yakni: pemerintah (*government*) dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*). *Good governance* akan dipandang sukses bilamana telah terwujud suatu hubungan yang harmonis antara ketiga pilar tersebut. Bukan hanya itu saja, prinsip-prinsip dasar dari wujud *good governance* juga harus dipenuhi, seperti: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, orientasi pada kesepakatan, visi strategis, serta efektif dan efisien (Wibisono,2022).

Kemudian muncul dampak dari revolusi industri 4.0 yang saat ini telah kita rasakan pada aspek kehidupan sehari-hari. Pembaharuan yang terjadi begitu cepat dan mudah tidak terlepas dari persoalan *Internet of Things (IoT)*, *machine learning*, *Artificial Intelligence (AI)*, *cloud computing services*, dan masih banyak lagi. Pada decane akhir-akhir ini sistem pemerintahan yang berbasis digital telah dikeluarkan sebagai bentuk realisasi peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan yang prima, efisien dan efektif. Berbagai upaya diterapkan guna untuk menerima, menyalurkan dan menyebarluaskan informasi sebagai bentuk kualitas pelayanan pemerintahan yang akuntabel (Wibisono:2022).

Pemerintah yang diharapkan sebagai perpanjangan tangan masyarakat bukan hanya melayani dirinya sendiri, namun harus mampu mengemban tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat yang sigap dan tanggap. Birokrasi yang *efektif, efisien, produktif*, dan transparan merupakan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menjanjikan Negara ini sebagai Negara maju di tahun 2030 mendatang. Lantas, untuk mewujudkan impian itu, Indonesia dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia melalui teknologi informasi digital. Hal ini merupakan tantangan baru sekaligus harapan baru untuk mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia. Salah satu upaya mewujudkan program digitalisasi birokrasi, perlu ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam badan birokrasi, yaitu keahlian adaptasi secara struktural maupun fungsional, kedua kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi. Kemampuan dalam memahami sumber informasi dengan menggunakan teknologi digital menjadi tuntutan dasar yang harus diikuti oleh manusia apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari birokrasi yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Stabilitas birokrasi sendiri dapat terganggu jika para birokrat tidak bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi masa kini.

Semakin maraknya tuntutan akan adanya digitalisasi birokrasi di Indonesia terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, membuat suatu daerah harus mandiri dan berpikir keras dalam menerapkan program tersebut. Prinsip dasar yang harus diingat, muara dari semua upaya digitalisasi birokrasi ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Digitalisasi Birokrasi ini dapat meningkatkan transparansi dan kemudahan Informasi publik, dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang *efektif inovatif profesional* dan akuntabel di Kabupaten Asahan maka Instansi yang terkait merumuskan penyusunan rencana program kerja Bidang Digitalisasi Birokrasi sehingga bisa sejalan dengan visi-misi Bupati-Wakil Bupati Asahan. Dimana, Digitalisasi Birokrasi ini merupakan program prioritas Bupati hasil pemilihan serentak 2020 ini.

Perkembangan di era revolusi industri digital saat ini, Kabupaten Asahan dituntut untuk mengikuti prosesnya tanpa memiliki alasan apapun. Semua OPD, harus siap dan saling terhubung dalam satu jaringan di dunia maya. Dinas Kominfo Asahan berharap pengembangan teknologi dan informasi publik bertujuan untuk percepatan layanan dan memangkas alur birokrasi serta cepat melayani masyarakat. Layanan tersebut, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah dan dikorelasikan dengan instruksi presiden di poin kedua, mengenai reformasi transformasi digital di sektor strategis. Perlunya pengembangan teknologi

dan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Asahan dengan tujuan untuk kebutuhan dari pemerintah dan dikorelasikan dengan instruksi Presiden poin kedua mengenai reformasi transformasi digital di sektor strategis (Jaka,2022).

Kehadiran program digitalisasi birokrasi dinilai sebagai ujung tombak dalam peningkatan pelayanan publik. Digitalisasi birokrasi membutuhkan perluasan dan peningkatan akses yang lebih luas terhadap infrastruktur digital, penyusunan transformasi digital pelayanan publik, dan kesiapan talenta digital. Kombinasi yang digunakan dalam pemanfaatan *big data*, teknologi informasi, dan kooperasi dari berbagai organisasi dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjawab persoalan di era digitalisasi. Beberapa fenomena kemajuan teknologi digital yang telah dinarasikan diatas menjadikan transformasi birokrasi digital menjadi penting untuk diterapkan. Perpaduan kolaborasi tersebut perlu terus diwujudkan dengan bantuan kreativitas dan inovasi baru yang mampu memberikan nilai tambah dalam perjalanan birokrasi ke depannya.

Methods

Penulisan ini fokus dilakukan di Pemerintah Kabupaten Asahan tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di jalan Mahoni Nomor 3 Kecamatan Kota Kisaran Barat Kelurahan Mekar Sari, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Penulisan ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu kegiatan yang berusaha menggambarkan fenomena dan peristiwa-peristiwa yang telah dan sering terjadi, pada umumnya untuk menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana”. Kegiatan ini mencakup pengumpulan fakta, pemilahan fakta serta generalisasi fakta (Ikbar,2012:3). Sementara itu, Miles dan Huberman dalam John W. Cresweel menyatakan bahwa penulisan kualitatif adalah sebuah proses investigasi di mana penulis secara bertahap berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, meniru, membandingkan, mengkatalogkan dan mengelompokkan objek studi (Creswell, 2009) yang didukung dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam.

Results and Discussion

Pelayanan berkualitas yang diberikan oleh organisasi publik kepada masyarakat tentunya harus didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tersedianya unit-unit media pelayanan informasi. Fasilitas ini bertujuan agar sistem manajemen informasi yang berhubungan dengan penyebaran dan penyaringan informasi dari pemerintah ke

masyarakat ataupun sebaliknya, dapat berlangsung dengan baik seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya media pelayanan informasi yang disediakan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan permohonan informasi kepada badan publik dapat difasilitasi, dan tentu saja harus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Kehadiran media informasi pelayanan tidak akan terlaksana dengan baik, jika tidak memiliki peran dari Bidang Komunikasi Media Cetak Dan Elektronik. Sebagai bidang yang menaungi penyebaran informasi di lingkup organisasi pemerintahan. Terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Asahan berawal dari Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri, dalam rangka pemenuhan percepatan dan perkembangan masing-masing Kota dan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Asahan memiliki cakupan yang lebih luas serta memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Bagian Sekretariat Daerah di Kabupaten Asahan.

Jika mengacu pada tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Asahan, bidang komunikasi media cetak dan elektronik memiliki fungsi menjalankan sebagian tugas Kepala Dinas yang mencakup tentang media dan hubungan dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penulisan dan data, ada beberapa tugas dan fungsi Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik ialah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dan penyusunan program yang berupa peliputan dan dokumentasi serta didukung oleh mitra
2. Menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan petunjuk teknis dalam peliputan, dokumentasi dan kemitraan, publikasi
3. Menerapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang peliputan dan dokumentasi serta kemitraan publikasi

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, informasi yang sudah dijaring melalui masyarakat. Kemudian di komunikasikan kepada atasan/pimpinan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Asahan. Kemudian masuk ke tahap Perencanaan (*planning*), yang dimana kehumasan melalui bidang komunikasi media cetak dan elektronik berusaha merumuskan dan merancang program kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berikut beberapa program kerja yang disusun oleh bidang komunikasi media ialah melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatannya:

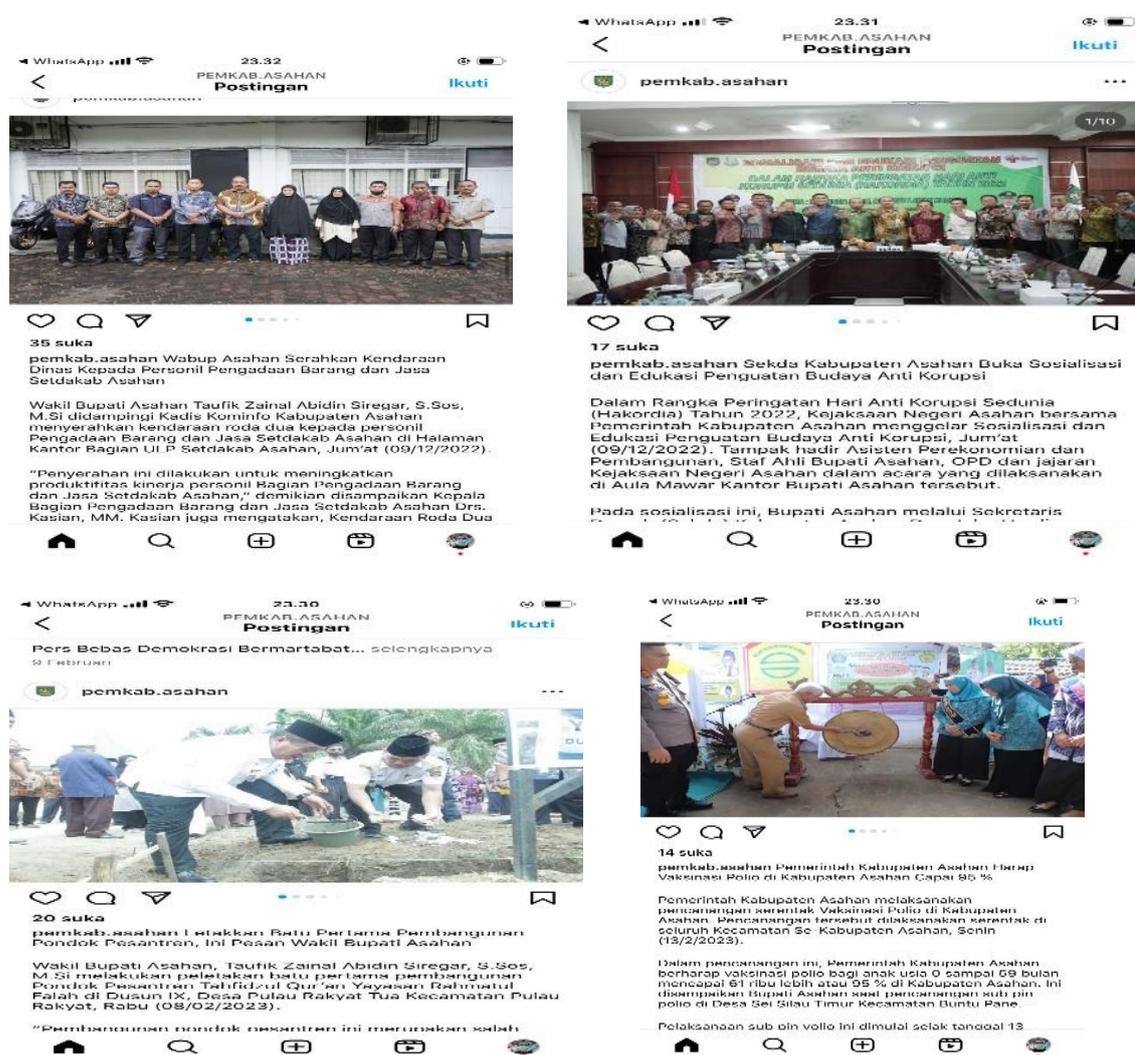
1. Pengelolaan media Komunikasi Publik
2. Pelayanan informasi publik
3. Layanan hubungan media
4. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
5. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan kehumasan

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja Diskominfo Kabupaten Asahan yang berada dibawah pimpinan Bupati Asahan H. Surya, B.Sc, Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki 10 Program Prioritas. Akan tetapi dari 10 program tersebut, penulis memfokuskan penulisan pada program digitalisasi birokrasi. Adapun Program Prioritas tersebut adalah:

1. Digitalisasi Birokrasi. Merupakan upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, professional, akuntabel dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan mudah, cepat, efisien, murah dan transparan. Seperti menciptakan kartu tanda penduduk tangguh, melaksanakan pelayanan delivery sistem adminduk, melaksanakan transparansi birokrasi.
2. Sumber Daya Manusia Tangguh. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan keahlian, pengetahuan dan perilaku yang unggul serta menghubungkan perusahaan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti yaitu membangun balai latihan kerja, melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan wirausaha muda.
3. Ekonomi Mandiri. Merupakan membentuk perekonomian rakyat dengan mendorong kehidupan masyarakat secara gotong royong berdasarkan aktifitas ekonomi yang tidak menganut prinsip ketergantungan, akan tetapi berdasarkan pemberdayaan. Seperti membangun mall usaha mikro kecil mandiri, membentuk kampung mandiri, memberikan insentif wirausaha tangguh, memberikan subsidi saran produksi pertanian untuk petani dan nelayan.
4. Asahan Sehat. Menciptakan kondisi lingkungan Kabupaten Asahan yang bersih, nyaman, dan sehat untuk ditinggali oleh penduduk yang diupayakan untuk dicapai melalui penerapan kegiatan terintegrasi untuk penurunan angka stunting, yang disepakati seluruh stakeholders. Seperti membangun rumah sakit modern berstandar Nasional, memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat miskin, meningkatkan insentif kader kesehatan.
5. Asahan Cerdas. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi melalui budaya literasi serta mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber inspirasi

- untuk menyelenggarakan pendidikan berkarakter yaitu kebersamaan, gotong royong dan tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat seperti memberikan beasiswa pendidikan pelajar/mahasiswa miskin dan berprestasi, meningkatkan kesejahteraan guru yang bukan PNS, memfasilitasi pendirian SMA/SMK Negeri di setiap Kecamatan.
6. Infrastruktur Kuat. Mengalokasikan 60% anggaran belanja yang selama ini terdapat pada belanja langsung APBD untuk membangun infrastruktur.
 7. Asahan Religius. Membentuk jati diri masyarakat yang beriman dan bertakwa. Ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar seperti pembentukan rumah mengaji di setiap kecamatan, pemberian sertifikat rumah ibadah gratis.
 8. Lingkungan Berbasis Partisipatif. Merupakan gerakan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan yang melibatkan masyarakat umum dan langsung terus menerus untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Seperti: melaksanakan Kisaran bebas banjir, membangun tempat pembuangan akhir sampah berstandar Nasional, membentuk kader lingkungan, mengembangkan ekowisata mangrove.
 9. Asahan Go Wisata. Berupaya meningkatkan potensi pariwisata dari segala aspek dan menjadikan suatu kesatuan paket wisata unggulan lewat pembuatan travel pattern (patron perjalanan wisata) seperti membentuk Peraturan Daerah tentang rencana induk pada wisata daerah, menciptakan Asahan *one stop edventure tourism*, wisata religi dan wisata kuliner
 10. Asahan Perang Covid-19. Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah Kabupaten Asahan perlu mengambil respon kebijakan secara tepat dan benar sesuai dengan arahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera.

Sebagai upaya dalam menunjang keberhasilan program digitalisasi birokrasi di Kabupaten Asahan, maka termuat beberapa hasil tampilan konten yang dipublikasikan melalui sosial media yakni:



Gambar.1 Konten Yang Dikelola Kominfo Kabupaten Asahan Tahun 2023

Dalam proses pembuatan konten tentu dilakukan secara prosedur dan perkembangan digitalisasi yang sudah diikuti oleh pihak Kominfo Asahan, hal ini didukung oleh pernyataan dari Analisis Konten Media Sosial yaitu Ibu Yessica Manurung :

“Pembuatan konten sudah sesuai prosedur yang berisi informasi-informasi penting seputaran kegiatan dari Kabupaten Asahan dan dipublikasi secara rutin di media sosial kita, banyak konten yang sudah kita buat. Diantaranya: kegiatan pelatihan, kerjasama, pemberi bantuan kepada masyarakat dan berbagai aktivitas dari pemerintah Kabupaten Asahan” (Sumber:Kmais, 12 Januari 2023 Pukul 11:00 Wib)

Pernyataan diatas diketahui bahwasannya dalam penyebaran informasi dan komunikasi yang dilakukan Kominfo melalui media cetak maupun elektronik, lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah konten di media sosial tersebut benar-benar sudah tersebar ke

seluruh masyarakat dan seperti apa pihak kehumasan dalam melihat hal ini, mengingat tidak seluruh masyarakat memiliki akses internet, HP maupun laptop. Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Bidang komunikasi media cetak dan elektronik Bapak Arief Budiman,SH bahwa:

“Konten yang ada di sosial media, harapannya bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Tapi kan kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan apakah ini sudah diakses oleh publik atau belum. Apalagi mengingat masyarakat kita yang sebagian pasif dalam melihat informasi keterbukaan publik” (Sumber: Jumat 6, Januari 2023 Pukul 13:45 Wib)

Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan merupakan salah satu dari empat bidang yang mempunyai tugas salah satunya membuat konten atau naskah berita. Melalui konten atau naskah berita inilah Diskominfo melakukan komunikasi digital kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait kegiatan pemerintah Kabupaten. Harapannya dengan sering membuat konten yang positif bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan

Peluang Program Digitalisasi

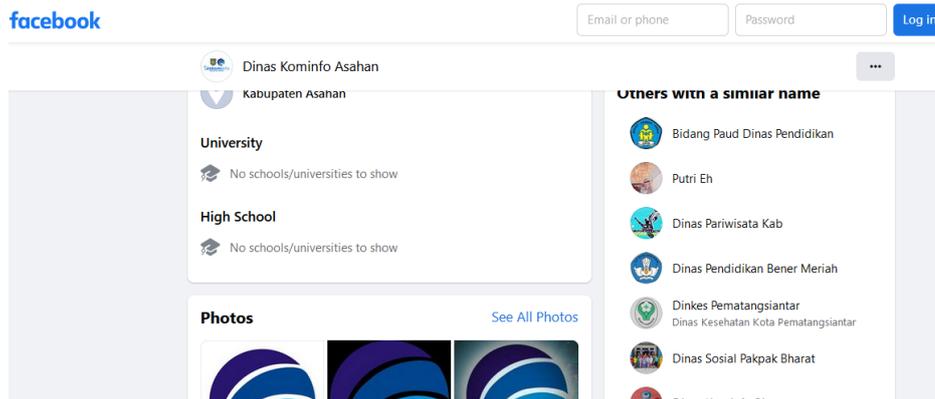
Media komunikasi yang dipakai melalui media massa cetak dan elektronik serta didukung oleh media *online* lainnya merupakan peluang dalam program digitalisasi birokrasi guna menyebarkan informasi terhadap publik. Berikut beberapa bentuk media yang digunakan Kominfo Kabupaten Asahan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yaitu:

1. *Web resmi* Diskominfo



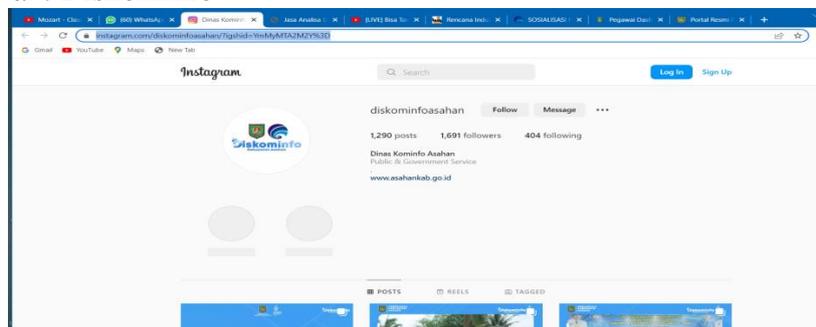
Gambar 2. Website resmi Diskominfo Asahan

2. Facebook DisKominfo



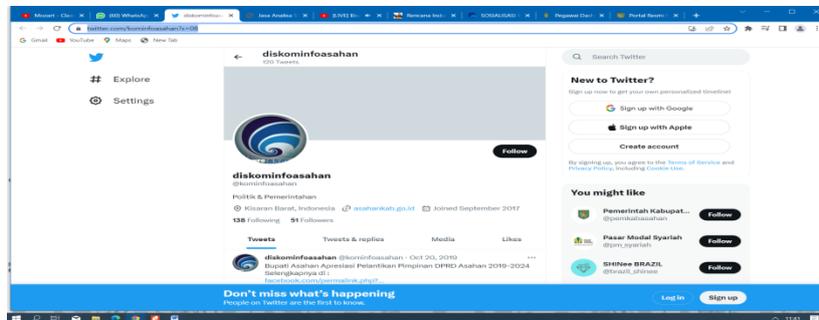
Gambar 3. Facebook Diskominfo Asahan

3. Instagram Diskominfo



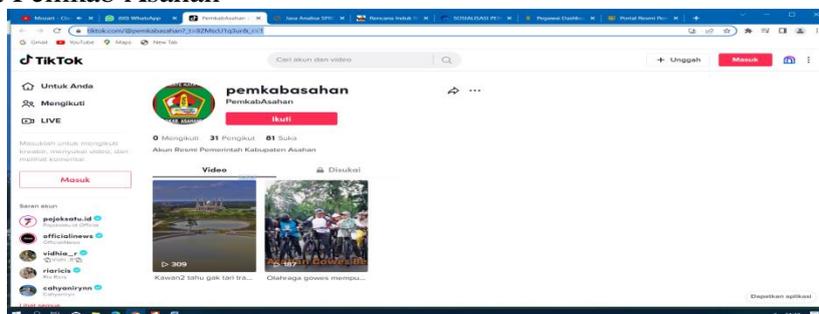
Gambar 3. Instagram Diskominfo Asahan

4. Twitter Diskominfo



Gambar 4. Twitter Diskominfo Asahan

5. Tiktok Pemkab Asahan



Gambar 5. Tiktok Diskominfo Asahan

Berdasarkan keterangan pada gambar-gambar diatas, dapat diketahui bahwasannya Pemerintah Kabupaten Asahan memiliki media komunikasi yang saat ini dikelola penuh dan menjadi tanggung jawab Diskominfo Asahan dalam mengoptimalkan penyebaran informasi dengan menggunakan media tersebut secara *up to date* di kalangan masyarakat. Penggunaan media tersebut, dipakai untuk menyebarkan informasi kepada seluruh unit kerja maupun masyarakat serta mempromosikan berbagai konten yang sudah siap dibuat oleh Kominfo Asahan. Tidak dapat dipungkiri, media memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungannya Organisasi Pemerintahan.

Tantangan Program Digitalisasi

Program digitalisasi Birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik berjalan dengan baik, bukan berarti tanpa tantangan. Masih ditemui beberapa rintangan yang dihadapi oleh Kominfo Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menjalankan program digitalisasi, diantaranya:

1. Masih minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah latar belakang keilmuan yang bukan berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi maupun yang berkaitan dengan Ilmu Jurnalistik, sehingga perlu diadakan pelatihan-pelatihan khusus agar menjadi profesional kehumasan yang handal. Yang dapat dilihat melalui strategi yang akan dikembangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan melalui skill dan pengalaman di dunia jurnalis. Petugas kehumasan harus lebih meningkatkan ilmu yang berkaitan dengan media agar dapat terlaksana dengan baik dalam menyebarkan informasi. Kurangnya sumber daya manusia pada Kominfo Kabupaten Asahan yang profesional sehingga kegiatan atau kerjasama yang dilakukan dengan pihak media masih monoton dalam bentuk desain konten.

2. Perbedaan Sudut Pandang

Perbedaan sudut pandang, artinya media dalam mempublikasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Asahan tidak secara utuh melainkan hanya yang sesuai dengan kepentingan pemerintah dalam menjaga citra atau reputasinya. Sehingga masyarakat selaku khalayak penerima informasi masih kurang memahami maksud dan tujuan berita tersebut.

3. Terbatasnya Anggaran

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi juga oleh kemampuan mengatur anggaran belanja instansinya. Apabila dana yang dimiliki masih belum dapat memenuhi kebutuhan, atau dibelanjakan secara tidak tepat, maka tujuan organisasi bisa tidak tercapai dan

perkembangan instansi akan menjadi lambat. Kecukupan anggaran dan efisiensi belanja media adalah sangat penting untuk perkembangan organisasi yang optimal. pada saat ini permasalahan yang dihadapi Kominfo Kabupaten Asahan ialah persoalan anggaran yang mana dalam menyelenggarakan kegiatan masih minim seperti pendanaan ke wartawan sehingga peran kehumasan terkadang terkesan kewalahan dalam melaksanakan tugasnya, karena sebagian pegawai yang melaksanakan tugasnya harus terjun ke lapangan dalam pengambilan data dan dokumentasi untuk kemudian diolah di kantor lalu disebarluaskan kepada masyarakat.

Kesimpulan

Pemerintah dituntut tanggap atas harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah dimana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat semakin lama semakin *smart* dan semakin *well informed* sehingga masyarakat ada kecenderungan “menuntut lebih” atas layanan publik. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan semakin gencar melaksanakan program digitalisasi birokrasi dalam peningkatkan pelayanan publik dengan menggunakan peluang dari berbagai media, diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, Youtube dan juga melalui website resmi www.asahankab.go.id dengan menampilkan konten yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik.

Dengan merujuk pada hasil kesimpulan diatas, maka penulis berharap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dapat mengembangkan dan meningkatkan upaya perencanaan strategis mengenai hal yang perlu dilakukan untuk sosialisasi program digitalisasi birokrasi secara langsung kepada masyarakat.

Referensi

- Jaka. 2022. Pemkab Asahan Gelar Forum OPD Bidang Digitalisasi Birokrasi
<http://www.inimedanbung.com/2021/03/18/pemkab-asahan-gelar-forum-opd-bidang-digitalisasi-birokrasi/>
- Milles, Matthew B and A Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analisis* (terjemahan). UI Press, Jakarta

- Lisa Adhrianti. (2016). Profesi Humas. Volume 6, No. 2, 2022, Hlm. 286-310 Website: [Http://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Profesi-Humas](http://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Profesi-Humas)
- M. S. (2020). View of COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses | Journal of Applied Learning and Teaching. Journal of Applied Learning & Teaching ,3 (1)(1). <https://journals.sfu.ca/jalt/index.php/jalt/article/view/191/163>
- Moon, M. J. (2002). The evolution of E-government among municipalities: Rhetoric or reality? Public Administration Review, 62(4), 424–433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>
- Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Nur Qoudri Wijaya, Syaiful Anwar, Unsul Abra. 2022. Peran Copywriter Dalam Pembuatan Konten Sebagai Sarana Media Informasi Digital Pada Dinas Kominfo bogor. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia Vol 08 No 01.
- Nur, Emilsyah. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online The Role Of Mass Media In Facing Online Media Attacks. Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa Vol. 2 No. 1 Juni 2021 Hal : 51 – 64
- Theaker,A.(2001) The Public Relations Handbook. New York:
- Undang-Undang Nomorr 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Yanuar, Ikbar. (2012). Metode Penulisan Sosial Kualitatif. Bandung : PT Refika Aditama.